

## PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Oleh

**PURNAMA SARI**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh Ciamis

e-mail: p.sari09@yahoo.com

### Abstrak

*Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.*

**Kata Kunci : Manajerial Pengelolaan, Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah**

### PENDAHULUAN

*Good Governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan dalam pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah dewasa ini. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lahirnya otonomi merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2005), beberapa misi yang terkandung dalam otonomi daerah adalah: (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara federal). Nyata karena memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut bertanggungjawab karena pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan kepada daerah demi pencapaian tujuan otonomi daerah. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang

demokratis, adil, rata, dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2005). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran merupakan salah satu masalah penting. Kenis (1979) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu dimasa yang akan datang. Mardiasmo(2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for Money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah (Fathillah, 2001).

Demikian juga dalam hal keuangan daerah yang dikelola oleh manajemen keuangan

daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut Kinerja Pemerintah Daerah (Herminingsih, 2009).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Anwar Nasution (2007), menegaskan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, ternyata kinerja pemerintah daerah (pemda) di tanah air masih jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel. Kinerja pemda belum sepenuhnya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya personel baik kualitas maupun kuantitas, terutama di tingkat kabupaten/kota. Daerah belum mampu dalam menyerap dana pembangunan yang begitu besar setelah adanya otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pada *Prospect Theory*, dapat dikatakan bahwa Pengelola Keuangan Daerah (PKD) akan ikut berperan aktif pada setiap kebijakan pemerintah manakalamerasakan bahwa implementasi kebijakan tersebut menguntungkan. Sebaliknya akan menunjukkan sikap yang kurang mendukung atau kurang berperan bahkan menolak pada setiap implementasi kebijakan manakala merasakan bahwa kebijakan tersebut dianggap merugikan. Sikap ini akan mempengaruhi Kinerja organisasi secara keseluruhan (Kahnerman dan Tversky, 1979).

Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hierarki yang paling rendah. Dalam hal ini Pengelola Keuangan Daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam hal sifat dan

Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah  
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
**PURNAMA SARI**

hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie, 1987).

Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai "peran" atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Mitzberg, 1973). Mitzberg menjelaskan bahwa para manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya didalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan antara lain:

1. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan peran sebagai forehead, leader dan liaison (penghubung),
2. Peran Informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai spokescperson,
3. Peran pengambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai *entrepreneur*, *disturbance handle*, *resources allocator* dan *negotiator*.

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan diatas, akan membutuhkan sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja seajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Disamping itu seorang manajer perlu untuk introspeksi mengenai tugas dan perannya sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal.

Peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Rohman, 2007). Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah menunjukkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan Pengelola Keuangan Daerah untuk mendorong kreatifitas Pengelola Keuangan Daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja

organisasi akan semakin tinggi (Rohman, 2007).

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Menurut Yeung dan Ulrich (dalam Akmal 2006) mengemukakan bahwa sumberdaya manusia mempunyai peran sentral dalam mewujudkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi yang pada akhirnya organisasi berbeda dengan pesaingnya dapat meningkatkan kinerja.

Peningkatan kinerja timbul atas adanya kebebasan berkreasi pada tiap individu yang kemudian pemimpin berperan dalam suatu iklim yang memungkinkan para anggota berpartisipasi penuh atas pengambilan keputusan. Pelibatan anggota organisasi dalam merancang peraturan organisasi dapat mempengaruhi diri mereka.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh, dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah. Seorang pengelola keuangan harus dapat memainkan perannya untuk dapat mewujudkan kinerja pemerintahan.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: "Performance is: (1) the process or manner of performing; (2) a notable action or achievement; (3) the performing of a play or other entertainment". Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau

sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui pelaksanaan suatu urutan kegiatan yang terencana.

Atmosudirdjo (dalam Haryanto, 2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, maka orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi (Herminingsih, 2009).

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai (Herminingsih, 2009).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait peran manajerial

pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait dengan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknik analisis data, dilakukan dengan langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian menyajikan hasil penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rohman (2007) melakukan survey pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota Jawa Tengah tentang Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berbagai penelitian terkait dengan kinerja banyak dilakukan. Hal ini sebagai konsekuensi dari permintaan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik yang menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian dilakukan oleh Setyawan (2002), Netty (2003), Leiwakabessy (2006), Heruwati (2007) dan Verbeeten (2008) mengkaji aspek kinerja di berbagai daerah dan dengan berbagai alat ukur yang digunakan. Pada intinya berbagai penelitian ini ingin membandingkan kinerja di suatu unit sudah sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Setyawan (2002) melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja anggaran keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari perspektif akuntabilitas tahun 1997-2001. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Malang belum baik karena dari sisi rasio pertumbuhan pendapatannya justru menurun.

Netty (2003), dalam penelitiannya mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2001. Alat analisis adalah metode AKIP untuk

Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah  
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
**PURNAMA SARI**

melihat program, kegiatan maupun kebijakan. Hasil pengukuran atas kinerja Dipenda Kabupaten Bengkulu Selatan adalah baik dari sisi program, kegiatan maupun kebijaksanaan.

Leiwakabessy (2006), melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon dengan menggunakan metode AKIP. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon dinilai sangat berhasil, baik dari capaian kegiatan, program maupun kebijakan.

Heruwati (2007), melakukan penelitian tentang kinerja Pemda Grobogan yang dilihat dari pendapatan daerah terhadap APBD tahun 2004-2006. Pengukuran kinerja di sini menggunakan metode analisa rasio terhadap APBD. Hasilnya menunjukkan Pemda Grobogan dari tahun ke tahun kinerjanya semakin baik dengan semakin meningkatnya prosentase tingkat capaiannya.

Verbeeten (2008) meneliti mengenai dampak penerapan manajemen berbasis kinerja terhadap pemerintahan di Belanda. Obyek penelitian adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi sektor publik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sasaran jelas dan terukur serta insentif berpengaruh terhadap kinerja. Terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukansasaran jelas dan terukur dibandingkan organisasi publik lainnya.

Penelitian yang dilakukan Herminingsih (2009) dengan tema pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah.

Hasil kajian pustaka di atas secara umum menyatakan bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (pengguna dan kuasa pengguna anggaran/barang) untuk mendorong

dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah. Peran manajerial para pengelola keuangan daerah seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya peran manajerial tersebut, mendorong para pengelola keuangan daerah untuk lebih berpartisipasi dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah daerah.

Hasil penelitian Herminingsih (2009) menyatakan bahwa para pengguna dan kuasa pengguna anggaran/barang pada Pemerintah Daerah merasa bertanggung jawab dan merasa ikut memegang kendali terhadap apa yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Adanya peran manajerial ini juga mendorong para pengelola keuangan daerah untuk mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja pemerintah daerah. Adanya komitmen ini yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan daerah mempunyai pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik.

Menurut Ratnawati (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah ada empat yaitu, kapasitas manajemen kewirausahaan, budaya organisasi, lingkungan makro dan *endowment* daerah, yang kesemuanya menuntut untuk segera dilakukannya pembenahan atau *reinventing local government*. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Rohman (2007) bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah diantaranya adalah peran manajerial pengelola keuangan daerah dan fungsi pemeriksaan intern. Peran manajerial pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tindakan yang dilakukan pejabat dengan menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi dan mendorong bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran manajerial pengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Peran manajerial pengelola keuangan daerah menunjukkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan

pengelola keuangan daerah untuk mendorong kreativitas pengelola keuangan daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapaitujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi.

Para manajer pengelola keuangan daerah dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan antara lain peran interpersonal yaitu seorang manajer harus dapat memainkan peran sebagai *forehead*, *leader* dan *liaison* (*penghubung*), peran informasional di mana seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai *monitor*,  *pemberi informasi* dan sebagai *spokesperson* serta peran pengambil keputusan yaitu para manajer digambarkan sebagai *entrepreneur*, *disturbance handle*, *resources allocator* dan *negotiator*. Fungsi pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Fungsi pemeriksaan intern mencakup mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian intern; pengujian atas pengelolaan informasi keuangan dan operasi pemerintah. Pengujian terhadap instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional, dan identifikasi keadaan yang tidak efisien; dan pengujian terhadap pengendalian non-finansial organisasi.

Adanya pengaruh yang signifikan dari hasil beberapa penelitian di atas menjelaskan bahwa peran kabag dan kasubag dalam pelaksanaan aktivitas berbagai bagian pada pemerintah daerah menjadi suatu yang penting. Pimpinan memiliki peran penting dalam mencapaitujuan organisasi. Peran yang baik dari kabag dan kasubag akan meminimalkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dari penerapan tugas di pemerintah daerah. Apabila seorang bawahan merasa nyaman dengan cara seorang pimpinan memimpin/mengontrol bawahan, maka bawahan memiliki motivasi yang tinggi untuk lebih berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pimpinan yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dapat menimbulkan dan memberikan rasa tanggung jawab serta mendorong kreativitas para bawahan untuk bekerja lebih

giat lagi dalam mencapaitujuan, sehingga kinerja organisasi akan lebih tinggi lagi.

### KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2006. *Pengaruh Peran Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Perusahaan: Persepsi Manajer Menengah BUMN*. jurnal Usahawan No 07 Tahun XXXV Juli.
- Coralie, Byant and White Louise. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Terjemahan. LP3ES.
- Fathillah, G. 2001. *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*. tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Haryanto. 2009. *Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2007*. Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hermingsih. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Tesis. Prodi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heruwati. 2007. *Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2004-2006*. Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Kahnerman, D and A Tversky. 1979. *Prospect Theory: an Analysis of Decisions under Risk*. *Econometrica* 47. p 263-291.
- Kenis, I. 1979. *Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*.
- Leiwakabessy. 2006. *Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah  
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  
**PURNAMA SARI**

- KotaAmbon Tahun 2004*. Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah*. Kompak No 23, 573-587.
- Mitzberg, H. 1973. *The Nature of Manajement Work*. Harper Row.
- Nety, H. 2003. *Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001*. Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Ratnawati, J. 2011. *Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Dian. Vol 11. No 2.
- Rohman, A. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah)*. Jurnal Maksi. Vol 7 No 2 Agustus 2007. hal 206-220.
- Setyawan, S. 2002. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas*. Fakultas Ekonomi UMM. Malang.
- Verbeeten, Frank H.M. 2008. *Performance Management Practices in Public Sektor Organizations: Impact on Performance*. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Volume 21 No 3, pp 427-454.

